

Nilai Ekonomi Syariah Sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Isyrokhu Fuaidi

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

fuaidi@ipmafa.ac.id

Abstrak

Diskursus terkait pemberdayaan masyarakat selalu menjadi isu penting yang menjadi perhatian serius oleh semua pihak baik pemerintah, akademisi, praktisi dan masyarakat umum lainnya. Semua berupaya untuk menghadirkan tawaran yang ideal terkait teori, konsep, kebijakan dan penerapan yang dapat dijadikan sebagai strategi pemberdayaan dalam membangun sebuah masyarakat. Dari banyaknya konsep dan ide yang ditawarkan, konsep strategi pemberdayaan yang dielaborasi melalui aspek nilai-nilai ekonomi syariah menjadi penting sebagai bagian yang akan melengkapi ruang-ruang gagasan pembangunan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang bersumber dari telaah jurnal dan buku-buku yang relevan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah meliputi penguatan profesionalisme (*al-itqan*) SDM, budaya kewirausahaan, berbasis kearifan lokal dan penguatan program berbasis filantropi. Nilai-nilai tersebut jika dapat diterapkan atau setidaknya menjadi kesadaran bersama dalam tatanan dan budaya masyarakat secara lebih luas, maka tidak mustahil program pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Discourse-related community empowerment remains increasingly important issue to which various concerning parties have always given serious attention in this regard including government, scholars, practitioners and the public in general. All strives to present an ideal concept regarding theories, insights, policies and implementations as empowerment strategy in building a society. The interesting aspect that still needs to be addressed in the discourse is related to the concept of empowerment strategies elaborated through Shariah economic values that will complement the spaces of community development atmospheres. This research uses a descriptive qualitative method with a literature study approach sourced from a review of journals and books that are relevant in the context of community empowerment. The results concludes that the implementation of community empowerment can be effectively implemented

by applying the principles and values of sharia economics approach such as increasing professionalism (al-itqan) of human resources, promoting entrepreneurial culture, local wisdom-based management and strengthening philanthropy-based programs. By applying or at least promoting these values in order to become a shared consciousness among society, the community empowerment programs will be more effectively implemented.

Keywords: *Sharia economy, Community Empowerment*

A. Pendahuluan

Konsep dan isu tentang pemberdayaan masyarakat selalu menjadi tema yang penting dalam berbagai diskursus keilmuan, baik yang berkaitan dengan aspek teoritis dan konseptual maupun implementasi praksisnya. Ini terbukti dari semakin banyaknya penelitian dan pembahasan ilmiah terkait pemberdayaan masyarakat dengan berbagai pendekatan yang berbeda-beda seperti dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial. Perkins dan Zimmerman (Ricciu et al., 2001) mengungkapkan bahwa kajian intelektual terhadap konsep pemberdayaan sebagai topik penelitian dimulai sudah cukup lama.

Penelusuran literatur psikologi menunjukkan bahwa dari tahun 1974 hingga 1986 telah mengidentifikasi 96 artikel yang mengandung akar kata “memberdayakan”, baik dalam judul maupun abstrak. Dari tahun 1987 hingga 1993, jumlahnya meningkat menjadi 686 artikel jurnal dan 283 bab buku. Ilmu-ilmu sosial lainnya juga mengalami pertumbuhan minat yang sama atau bahkan lebih besar terkait topik pemberdayaan. Selanjutnya di tahun 1974 hingga Agustus 1994, penelitian yang berhubungan dengan sosiologi menunjukkan terdapat 861 artikel yang membahas tentang pemberdayaan. Dalam penelitian pendidikan, jumlah artikel tentang topik pemberdayaan meningkat dari 66 antara tahun 1966 dan akhir tahun 1981 menjadi 2.261 di tahun 1982 hingga Maret 1994. Hal ini semakin bertambah dengan berkembangnya kajian dan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat.

Isu pemberdayaan masyarakat semakin menemukan urgensi dan konteksnya jika melihat perkembangan kualitas dan mutu SDM di Indonesia yang masih menjadi persoalan hingga saat ini. Sejumlah persoalan ini meliputi aspek pendidikan masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2022 adalah 8,69 tahun. Angka ini, meski naik dibanding tahun sebelumnya, masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara

tetangga, seperti Malaysia (10,6 tahun) dan Singapura (12,6 tahun). Dalam aspek yang sama, kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia juga masih tergolong rendah. Hasil survei PISA (Programme for International Student Assessment) dari tahun ke tahun hingga 2018 menunjukkan bahwa Indonesia selalu berada dalam 10 besar skor paling rendah dari semua negara yang mengikuti PISA. Oleh sebab itu, maka tidak mengherankan apabila tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh SDM lulusan SD ke bawah (38,76%).(Widya Finola Ifani Putri, 2023)

Di sisi lain, skor Human capital index (HCI) atau Indeks Sumber Daya Manusia yang dirilis Bank Dunia pada tahun 2020 yang hanya 0,54 atau peringkat 96 dari 175 negara tentu belum menunjukkan sesuatu yang menggembirakan (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2023). Ini berarti produktivitas dari setiap anak yang lahir hanya mencapai 54 persen dari kapasitas idealnya. Nilai ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (0,60) dan Singapura (0,73). Indeks tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa hal lain seperti kemampuan penguasaan bahasa asing masyarakat Indonesia yang masih rendah di Indonesia, terutama bahasa Inggris. Hal ini tentu dapat menghambat SDM Indonesia dalam berkompetisi di dunia global yang sangat dinamis dan disruptif. Selain itu, rendahnya indeks SDM menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatif masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan di era digital.

Persoalan lain yang dihadapi masyarakat saat ini juga terkait dengan tatakelola atau manajemen yang mencakup tiga aspek yaitu manajemen pemerintahan, organisasi atau kelembagaan, dan manajemen sumberdaya insani yang berkualitas. Terkait hal yang pertama, tatakelola pemerintahan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan pemerintahan yang seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Addink, 2018). Namun dalam praktiknya, tatakelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan kurangnya profesionalitas pegawai pemerintahan, baik dari segi kompetensi maupun integritas. Hal ini tentu dapat menghambat kinerja pemerintahan dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti korupsi dan kolusi (Apriyanti, 2023). Persoalan lain terkait tatakelola pemerintahan adalah adanya birokrasi yang berbelit-belit yang mengakibatkan kinerja dan aktivitas lembaga menjadi tidak efisien yang

pada akhirnya menyulitkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik dan menghambat investasi. (Putri, 2012)

Dalam tatakelola kelembagaan, pola manajemen yang dibangun masyarakat Indonesia juga masih banyak dilakukan dengan cara tradisional yang minim budaya efektif-efisien. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa masih terdapat upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tatakelola perusahaan. Upaya tersebut meliputi inovasi dalam pelayanan, pengelolaan manajemen risiko, peningkatan budaya kepatuhan, dan penerapan tata kelola teknologi informasi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki tatakelola perusahaan agar sesuai dengan standar efektifitas dan efisiensi yang diinginkan.

Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang pemberdayaan memiliki urgensi penting. Urgensi penelitian terkait pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal, pertama bahwa proses pembedayaan masyarakat merupakan kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya yang berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat seperti peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan sosial dan sumberdaya manusia yang kompetitif. Dengan penguatan kompetensi dan skill individu maupun kelompok dalam masyarakat, mereka akan dapat berdaya dan aktif dalam mengambil keputusan yang berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak mengherankan jika sebagian kebijakan pemerintah dalam perkembangannya mengarah pada program pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh baik di desa maupun kota. (Tanjung & Saputra, 2023)

Dasar kedua, strategi dan konsep pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Seperti yang diagendakan oleh United Nations Development Programme, pemberdayaan masyarakat adalah unsur penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs). Dengan memberdayakan masyarakat, terutama yang berada di daerah marginal, pembangunan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan merata. (United Nations, 2015)

Ketiga, dalam konteks pendidikan, strategi pembedayaan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pendidikan. Menurut Freire dalam teori penyadarannya, pendidikan yang

berorientasi pada pemberdayaan mampu mengubah masyarakat menjadi lebih kritis dan inovatif. Hal ini sangat penting mengingat pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan karakter dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Freire memandang pemberdayaan sebagai proses yang dialektis dimana individu dan kelompok terus-menerus belajar dan berubah. Proses ini dimulai dengan kesadaran diri untuk menyadari kondisi mereka dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi mereka. Setelah kesadaran diri tersebut muncul, maka mereka dapat mengembangkan pemahaman kritis tentang realitas kehidupan sosial sehari-hari. Pemahaman kritis ini melibatkan analisis struktur kekuasaan dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. (Wallerstein & Bernstein, 1988)

Keempat, strategi pemberdayaan masyarakat juga penting dalam konteks politik dan demokrasi dan bahkan pemberdayaan merupakan hal tidak dapat dipisahkan dari politik. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi yang lebih kuat dan legitimate (Brinkerhoff & Azfar, 2022). Dengan adanya masyarakat yang berdaya, proses demokrasi menjadi lebih transparan dan partisipatif. Kemajuan dan kemunduran sebuah negara tentu banyak dipengaruhi oleh SDM pengelola dan penentu kebijakan strategis dimana hal itu ditentukan oleh dinamika politik sebuah negara. Tersedianya SDM masyarakat yang kompeten, berwawasan pemberdayaan dan partisipatif tentu akan membawa kemajuan sebuah bangsa dan negara dan ini menjadi bagian yang melekat dalam struktur negara, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat secara umum.

Kelima, dalam aspek ekonomi, strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan (Pentury et al., 2023). Penelitian Narayan menunjukkan bahwa dengan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin, distribusi kekayaan dapat lebih merata dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Bank, 2002). Masyarakat yang berdaya menjadikannya lebih kompetitif sehingga memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi yang dalam perkembangannya cukup ketat dan diruptif. Dengan demikian pada akhirnya kompetensi yang mereka miliki dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam berbagai aspek. Adanya pemberdayaan menjadikan individu dan kelompok memperoleh akses ke sumber daya, keterampilan, dan kekuasaan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi mereka. Proses pemberdayaan ini tentu mencakup pengembangan kompetensi SDM dalam kegiatan ekonomi, penguatan kemampuan individu dan kelompok untuk menghasilkan, mengelola dan mengkonsumsi barang dan jasa, dan program-program lain yang secara praktis mendorong kompetensi masyarakat.

Berangkat dari beberapa persoalan dan diskursus di atas, maka jelas bahwa strategi pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, pendidikan, politik, hingga ekonomi. Pendekatan yang holistik dan inklusif terkait pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum. Namun demikian, dalam konteks ini, penulis akan membahas konsep atau strategi pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah.

B. Metode

Studi pemberdayaan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana akan dilakukan kajian analitis terhadap literatur ilmiah yang ada meliputi artikel jurnal dan buku pemberdayaan masyarakat. Analisis tersebut diupayakan dapat menguraikan secara mendalam terkait makna perilaku subjek penelitian sesuai fokus kajian sehingga memberi kesimpulan atau penafsiran yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai ruang lingkup kajian penelitian kualitatif yang menekankan pembahasan holistik, teori yang diterapkan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan fenomena di lapangan (Sugiyono, 2016). Selanjutnya tujuan penulisan ilmiah ini untuk menguak secara lebih jelas konsep atau strategi pemberdayaan masyarakat dalam konteks dan diskursus nilai-nilai ekonomi syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka atau literatur berupa artikel penelitian, jurnal, dokumen serta buku referensi yang didapatkan dari beragam sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan strateginya dalam perspektif nilai-nilai ekonomi syariah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Narayan menjelaskan bahwa istilah pemberdayaan mempunyai konotasi yang berbeda-beda sesuai konteks sosiokultural dan politik yang melingkupinya. Eksplorasi penggunaan istilah-istilah yang dikaitkan dengan pemberdayaan selalu berujung pada diskusi dan perdebatan yang hidup. Sebutan-sebutan lain yang mengindikasikan istilah pemberdayaan meliputi kekuatan diri, kemandirian, penguasaan, kekuatan diri, pilihan sendiri, kehidupan yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai, mampu memperjuangkan hak-haknya, pengambilan keputusan sendiri, bebas, kebangkitan, dan kemampuan (Bank, 2002). Pemberdayaan adalah perluasan aset dan kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengendalikan dan menjalankan roda lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Selanjutnya Rakib menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang memperhatikan nilai-nilai sosial yang bersifat konkrit dan tercermin dalam paradigma baru pembangunan yaitu berpusat pada masyarakat, aksi sosial partisipatif, memberdayakan dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Konsep pemberdayaan masyarakat lebih luas dari sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau memberikan cara untuk mencegah kemiskinan. Konsep pemberdayaan dipahami sebagai upaya mencari alternatif yang lebih baik dari pertumbuhan yang terjadi di masa lalu. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mencakup pemberdayaan ekonomi menekankan pada pentingnya kemandirian masyarakat sebagai sistem organisasi. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan peran nyata pada setiap individu untuk bertindak tidak sebagai objek melainkan sebagai pelaku atau aktor yang menentukan kehidupannya sendiri. (Rakib, 2016)

Hampir senada, Habib mengelaborasi bahwa pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan). Implementasi pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Alhada et al., 2021).

Selanjutnya terkait tujuan pemberdayaan, sebagai suatu kegiatan yang membutuhkan proses, maka program/kegiatan pemberdayaan masyarakat mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pada muaranya, masyarakat menjadi lebih sejahtera secara ekonomi, berdaya secara skill, mampu atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan dapat menciptakan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep kemandirian yang dimaksud tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga secara sosial, budaya, hak bersuara, berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

2. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa kajian penelitian telah menyinggung tema pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam seperti Bintoro yang memberikan analisa kritis terhadap perkembangan lembaga keuangan Islam yang orientasinya masih banyak *profit oriented* dan kurang berpihak pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Menurutny, ekonomi syariah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan nilai-nilai dan Islam yang komprehensif dan universal. Karakter dan cakupannya yang luas dapat dilihat dari dinamika dan diskursus *mu'amalah* yang begitu dinamis, sehingga tidak

mengherankan jika ekonomi syariah sangat relevan diterapkan pada banyak konstruk masyarakat, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam hal ini meliputi: partisipasi dan kemitraan, pencapaian kesejahteraan (falah), penolakan terhadap aksi individualisme seperti ekonomi klasik, bersumber dari wahyu, berorientasi dunia dan akhirat, menjunjung tanggungjawab sosial, dan adaptif terhadap perubahan zaman (Bintoro, 2021).

Nilai-nilai ekonomi syariah terkait pemberdayaan masyarakat yang relevan pada dasarnya mencakup beberapa hal seperti konsep kepemilikan manusia yang tidak mutlak, prinsip keadilan (*al-adalah*), keseimbangan, kebebasan (*al-hurriyyah*), kebersamaan (*at-ta'awun*), tidak berperilaku zalim (*al-zhulm*) seperti pelarangan riba, kejujuran dan transparansi, perputaran harta (*tadawul*), kebersamaan, persatuan dan tolong-menolong, memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan. (khoerul ummah, 2022)

3. Nilai-Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi pemberdayaan Masyarakat

Terdapat sejumlah konsep terkait implementasi model pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai model-model strategi pemberdayaan Islam. Model tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga filantropi Baznas, penguatan perempuan rentan, pemberdayaan ekonomi petani, dan wakaf uang (Sanrego & Taufiq, 2023). Ada pula model pemberdayaan masyarakat berbasis media sosial (medsos) dimana medsos dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait diseminasi dan akses informasi, penyebaran nilai, dan dapat interaksi sosial yang positif (Anwar & Muniruddin, 2023). Strategi pemberdayaan yang bersifat top-down dapat dilakukan dengan beberapa penerapan kebijakan yang mengarah pada pembangunan masyarakat seperti pembangunan SDM melalui edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok melalui Bumdes, kelompok tani dan lainnya, pemupukan modal, pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna (Risma, 2021).

Perspektif lain dapat diambil dari Jim Ife bahwa terdapat tiga strategi yang dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat meliputi perencanaan dan kebijakan (*planning and policy*), aksi sosial dan politik, dan peningkatan kesadaran dan pendidikan. Terkait strategi yang pertama yakni perencanaan dan kebijakan, upaya yang dilakukan adalah mengembangkan struktur dan kelembagaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses berbagai sumber kehidupan untuk meningkatkan taraf hidup. Perencanaan dan keberpihakan kebijakan dapat dirancang untuk menyediakan sumber penghidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai pemberdayaan. Kemudian aksi sosial dan politik (*social and politic action*) berarti upaya pemberdayaan melalui kekuasaan politik supaya lebih lebih berpihak dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik. Dengan demikian tercipta keterlibatan masyarakat dalam kancah politik dalam aktivitas pemberdayaan. Strategi ketiga adalah pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran. Ide terakhir ini berangkat dari realitas masyarakat yang mengalami keterpurukan sering disebabkan oleh tidak adanya keterampilan untuk bertahan hidup secara ekonomi dan sosial, maka perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan lapis bawah untuk meningkatkan kekuatan mereka (Zubaedi, 2013). Pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses pembangunan dimana pemangku kepentingan endogen (pemerintah, swasta, dan masyarakat) terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Prinsip penerapannya adalah kerjasama antara para pemangku kepentingan yang akan menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks ini, peneliti melihat bahwa pembahasan tentang nilai-nilai ekonomi syariah termasuk dalam kategori strategi ketiga dalam perspektif Ife. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa nilai dan prinsip merupakan suatu entitas yang muncul dari pola pikir dan kesadaran seseorang yang pada akhirnya - jika nilai tersebut sudah tertanam dan melekat pada diri seseorang - akan mendorong seseorang dalam berperilaku dan bersikap. Pandangan ini senada dengan Zimmerman yang memandang konsep pemberdayaan mencakup dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pertama terkait konsep teoritis tentang proses, konsekuensi, kontrol dan

pengaruh kebijakan yang berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, kemudian yang kedua bahwa pemberdayaan adalah tatanan nilai untuk bertindak dalam masyarakat (Zimmerman, 2000). Demikian itu yang menjadikan peneliti merumuskan konsep nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut:

a. Prinsip *al-Itqan* (profesionalisme) dalam manajemen

Profesionalisme dalam ekonomi Islam adalah suatu sikap dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan pekerjaan, profesi dan usaha (Abdul Ghofur, 2020). Profesionalitas tercermin dari prinsip-prinsip Islam yang ditanamkan dalam banyak kegiatan ekonomi seperti bersikap disiplin dan mentaati sebuah kesepakatan, memenuhi hak-hak yang benar, kejujuran dalam bisnis seperti akad amanah (murabahah) dan seterusnya. Dalam suatu kaidah fikih berbunyi bahwa menjaga hal yang lama yang masih baik dan mengadopsi hal baru yang lebih baik. Konsekuensi dari nilai ini adalah hendaknya dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat menerapkan tatakelola organisasi dengan model POAC yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerjaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

b. Prinsip Wirausaha dan Bekerja Keras

Sikap dan perilaku berwirausaha adalah mental dan jiwa yang selalu aktif kreatif, berdaya, bercrepta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dimana hal ini menjadi bagian integral dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda bahwa *tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah* (HR. Muslim). Dalam hadist lain disebutkan bahwa *Amal yang baik adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri* (HR. Ahmad). Dalam banyak tempat, hukum Islam (fikih) berbicara panjang lebar tentang amal perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan harta seperti zakat, sedekah, nafkah, ibadah haji, *muamalah maliyah* (kegiatan terkait harta seperti jual beli, sewa-menyewa dll). Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi Islam menjunjung tinggi perilaku wirausaha yang secara filosofis dan praktis mengandung banyak nilai-nilai pemberdayaan masyarakat seperti kemandirian, peningkatan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

c. Prinsip Pembangunan Ekonomi Berbasis Filantropi

Kegiatan filantropi dalam berbagai bentuknya sangat dianjurkan oleh syariat Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Filantropi Islam memiliki tujuan sosial dan spiritual yakni selain membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memperoleh pahala dan beribadah kepada Allah, praktik filantropi juga menjadi sarana untuk pembangunan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yakni pemberdayaan masyarakat. Filantropi Islam yang dalam perkembangannya cukup dinamis munculnya lembaga sosial seperti lembaga amil zakat, lembaga wakaf, yayasan sosial, platform fundraising sosial dan sejenisnya, semua memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan berdaya (Naisabur et al., 2023). Filantropi Islam dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep filosofis dalam kegiatan filantropi Islam juga dapat dipahami bahwa harta yang dimiliki seseorang harus terdistribusi secara fair dengan tanpa menghilangkan hak-hak orang lain yang kekurangan. Muatan nilai kepedulian dan kebersamaan ini jika menjadi kesadaran bersama dan diimplementasikan dengan baik maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi masyarakat dan menghilangkan ketimpangan sosial.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan erat antara konsep pemberdayaan masyarakat dengan nilai-nilai filosofis yang mendasari ekonomi syariah. Nilai-nilai tersebut meliputi perilaku kreatif-inovatif, berorientasi masa depan dengan manajemen profesional, membangun budaya wirusaha dan bekerja keras, berbasis kearifan lokal dan maksimalisasi kegiatan filantropi. Semua nilai dan prinsip ekonomi Islam adalah untuk kemajuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan baik material, sosial dan spiritual. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar ideal dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih maju.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur. (2020). *Falsafah Ekonomi Syariah* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Addink, G. H. (2018). Good Governance: Importance in Practice, Theories and Definitions. *Halu Oleo Law Review*, 1(1).
- Andini Lutfiah Putri. (2012). Pengaruh Reformasi Birokrasi Dalam Mempermudah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Di Daerah. *Jurnal JISIPOL*, 7(1).
- Anwar, A., & Muniruddin, M. (2023). Islamic Community Empowerment Through Social Media In Tanjungbalai City. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 16(1).
- Apriyanti, R. (2023). the Influence of Employee Professionalism and Competence in Improving the Quality of Employee Service One Stop Integrated Services, Kembangan District, West Jakarta Administrative City. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1).
- Bank, W. (2002). Empowerment and poverty reduction: a sourcebook. *Choice Reviews Online*, 40(04).
- Bintoro, R. W. (2021). Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia). *Problems of Legality*, 153.
- Brinkerhoff, D. W., & Azfar, O. (2022). 4 Decentralization and Community Empowerment. *Making Decentralization Work*, October.
- Habib, M. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2).
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca*, 1(1).
- Khoerul Ummah. (2022). Internalisasi Nilai Ekonomi Islam sebagai Ekosistem Ekonomi di Era Metaverse. *JoIE: Journal of Islamic Economics*, 2(I).
- Naisabur, N., Putra, H. M., Naisabur, C. A. P., Farid, D., & Ahyani, H. (2023). Islamic Philanthropy Fiqh in Modern Context. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1).
- Pentury, G. M., Risambessy, A., Sijabat, A., Leuhery, F., Manajemen, P., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2023). Strategi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Meningkatkan Usaha Masyarakat Di Desa Lilibooi. *Community Development Journal*, 4(2).
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, D. R. (2023). *Tantangan Mewujudkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Melalui Pengelolaan*

Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja sama Industri dan Dunia Kerja (Iduka) pada Kementerian Perindustrian.

- Rakib, M. (2016). Strategies of community empowerment for the economic development in Makassar Indonesia. *Man in India*, 96(11).
- Ricciu, A., Secco, F., Venturini, M., García, B., & Leal, J. M. (2001). Kinetics of the interaction of indium(III) with 8-quinolinol-5-sulfonic acid and with sulfate. *Chemistry - A European Journal*, 7(21).
- Risma, W. D. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *E-Journal Inskripsi*, 1(1).
- Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2023). Review on Islamic Empowerment Model. *Tamkin Journal*, 2(2).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed., Vol. 4, Issue 1). CV. Alfabeta.
- Mujahiddin, Tanjung, Y., & Saputra, S. (2023). Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang. *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 9(2).
- United Nations. (2015). *The 2030 Agenda for Sustainable Development's 17 Sustainable Development Goals (SDGs)*. 10–15. [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030Agenda for Sustainable Development web.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf)
- Wallerstein, N., & Bernstein, E. (1988). Empowerment Education: Freire's Ideas Adapted to Health Education. *Health Education & Behavior*, 15(4).
- Widya Finola Ifani Putri. (2023). *Data: Pekerja di Indonesia Mayoritas Lulusan SD*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230517184903-4-438295/data-pekerja-di-indonesia-mayoritas-lulusan-sd>
- Zimmerman, M. (2000). Handbook of Community Psychology. *Handbook of Community Psychology*, December. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6>
- Zubaedi. (2013). *Buku Pengembangan Masyarakat (1).pdf* (p. 270).

